

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto., *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021
- Ansaar., *Arsitektur Tradisional Daerah Mamasa*, Jakarta, Direktorat Tradisi, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011
- Bosko, Rafael Edy., *Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta, ELSAM, 2006
- Buijs, Kees., *Ancient Traditions in Toraja Houses of Mamasa West Sulawesi*, Makassar, Innawa, 2018
- Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Masyarakat Batak (KERABATA), *Pemberdayaan Hak Mahudat Masyarakat Hukum Adat Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah*, Jakarta, Permata Aksara, 2011
- Emirzon, Joni., *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Erwiningsih, Winahyu dan Fakhriyasa Zalili Sailan., *Pejabat pembuat Akta Tanah*, Yogyakarta, Buku Litera, 2021
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Hadikusuma, Hilman., *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003
- Hadisaputro, Priyantio dan Ulya Yasmine Prisdani., *Negosiasi & Mediasi Penagihan*. Jakarta, Adhi Sarana Nusantara, 2021
- Harsono, Boedi., *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke 12, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2019
- Klis, W. A. van der., *Datanglah Kerajaan-Mu*, Tana Toraja, Sulo, 2007
- Mandadung, Arianus., *Tourism Information Mamasa Regency West Sulawesi Province Indonesia*, Mamasa, Tourism Information Service, 2008

Mandadung, Arianus., *Keunikan Budaya Pitu Ulunna Salu Kondosapata*, Mamasa, 1982

Margono, Suyud., *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (ADR) : Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*. Ciawi, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, 2005

Sudaryanto, Agus., “Fenomena Individualisme Tanah dalam Hukum Kewarisan Adat Jawa”, dalam *Menelusuri Pemikiran Hukum Agraria Prof. Maria S.W. Sumardjono*, ed. oleh Nurhasan Ismail, Rikardo Simarmata, dan Rafael Edy Bosko, Yogyakarta, Genta Publishing, 2023 Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2006

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Mataram University Press, 2020

Mustofa., *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, Karya Media, 2014

Nasution, S. *Metode research (Penelitian Ilmiah): Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta, Bumi Aksara, 2006

Panuh, Helmy., *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2012

Pemerintah Kabupaten Mamasa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, *Sejarah Awal Munculnya Kata Mamasa, Ungkapan Tradisional, Hukum Adat & Pemali Apparandanna Pitu Ulunna Salu*, Mamasa, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mamasa T.A 2013 Provinsi Sulawesi Barat, 2013

Pide, A. Suriyaman Mustari., *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Rawamangun, Jakarta, Kencana, 2014

Purwati, Ani., *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya, CV Jakad Media Publishing, 2020

Rato, Dominikus., *Hukum Adat: Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang, 2011

Rinoza, Renal dan Risman Buamona., *Bumi dan Manusia Sebuah Ihwal tentang Perubahan Sosial-Eklogi di Dataran Tinggi Sulawesi*, Bogor, Tim Kaji Tindak Malabar, 2019

Rizki, Agusta Pinta Kurnia dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2022

Santoso, Thomas., *Konflik dan Perdamaian*. Surabaya, CV Saga Jawadwipa, 2019

Sembiring, Rosnidar., *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok, 2017

Setiady, Tolib., *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Cet. 1. Bandung, Alfabeta, 2008

Simarmata, Rikardo, Tody Sasmita Jiwa Utama, Sartika Intaning Pradhani, Yance Arizona, Almonika Cindy Fatika Sari, Revoliyando Zakaria, Muchammad Chanif Chamdani, Septilia Mahardika, dan Novia Faradila., *Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur*, Yogyakarta, Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021

Sudantra, I Ketut., *Pengakuan Peradilan Adat : Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Bali, Swasta Nulus, 2016

Sumardjono, Maria S. W., *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta, Kompas, 2008

-----., *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2019

Triana, Nita., *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, Yogyakarta, Kaizen Sarana Edukasi Yogyakarta, 2019

Utami, Westi dan Sarjita., *Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa*. Yogyakarta, STPN Press, 2021

Utomo, Stefanus Laksanto., *Hukum Adat*. Cetakan ke-1, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani., *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah., *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta Selatan, Pustaka Yustisia, 2011

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6841)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga  
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Tahun 2018  
Nomor 569)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri  
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997  
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  
1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 722)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020  
tentang Hutan Adat dan Hutan HAK (Berita Negara Tahun 2020 Nomor  
1014)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan  
Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah  
(Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1077)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan  
dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara  
Tahun 2024 Nomor 149)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari  
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7)

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang  
Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum  
Adat Ammatoa Kajang (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 09)

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan  
dan Pengembangan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor  
169)

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat  
Adat (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10)

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat  
Masyarakat Hukum Adat dan Pemanfaatannya untuk Pembangunan di

Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 15)

### **Jurnal dan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi)**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa, “Kabupaten Mamasa Dalam Angka 2024”, *BPS Kabupaten Mamasa*, Volume 15 (2024)

Demmalino, Lili Ayu Silvani., “Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa balla Satanetean Kec. BallaKab. Mamasa)”, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, 2022

Huis, Stijn Cornelis van, Theresia Dyah Wirastri, Erasmus Chayadi, Ermelina Singereta, Almonika Cindy Fatika Sari, Sartika Intaning Pradhani, Tody Sasmitha Jiwa Utama, Jane Aileen Tedjaseputra, dan Alfeus Jebabun., “Kontestasi dan Dinamika Keberlakuan Hukum Adat dalam Ruang Persidangan” *Diktum*, Edisi 14 (Maret 2021)

Ma’dika, Martinus, “Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah Secara Adat di Kabupaten Mamasa”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Bosowa, 2022

Rimawati, “Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Pelayanan Kesehatan Melalui Pranata Adat dan Pranata Hukum Formil”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019

Sailan, Fakhriyya Zalili., “Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rongi Di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016

Suryana Atang, “Pelepasan Hak atas Tanah Adat Suku Hatam Terkait dengan Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Manokwari Selatan”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021

### **Sumber Internet**

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/socio-legal--mengembalikan-hakikat-hukum-yang-tak-sekadar-doktrin-normatif-lt5d64b0d431078/?page=2> (diakses 5 Oktober 2023)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>, (diakses 05 Oktober 2023)

Repositori Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, <https://repositori.kemdikbud.go.id/10904/1/Peran%20Lembaga%20Adat.pdf> (diakses 13 Maret 2024)

Mandar News, <https://mandarnews.com/meminta-pengampunan-ritual-massaludigelar/> (diakses 29 Maret 2024)